

*Jurnal*

**ILMIAH AKUNTANSI & HUMANIORA**

ISSN: 2089-3310 Vol.4, No.2, Juni 2015

**PENGARUH KONSEP *FRAUD TRIANGLE* TERHADAP TINGKAT PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI MAKASSAR**

*Tenriwaru*

**FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH**

*Amiruddin dan Syarifuddin*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM DITERAPKANNYA PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP DI UMKAM (STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN BULELENG)**

*Ni Kadek Sinarwati*

**DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *FRAUD TRIANGLE***

*Tetty Apriani, Ni Wayan Rustiarini, dan Ni Made Sunarsih*

**PENGARUH REPUTASI DAN ETIKA PIMPINAN PADA SENJANGAN ANGGARAN LEMBAGA PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN BULELENG**

*I Nyoman Putra Yasa*

**PRIORITAS PROGRAM KERJA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) UNIT KERJA PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI**

*Niswatin dan Nilawaty Yusuf*

**EFEK MODERASI KOMITE AUDIT PADA HUBUNGAN RISIKO PERUSAHAAN DENGAN KONSERVATISME AKUNTANSI**

*Luh Wayan Sumarlani dan I Gede Cahyadi Putra*

**PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* PADA MANAJEMEN LABA OLEH *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* BARU**

*Gerianta Wirawan Yasa dan Ni Putu Luvy Orty Andhani*

**MERETAS PEMAHAMAN DAN KEBERTERIMAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI**

*Rahayu Indriasari dan Muhammad Ansar*

**PENGUKURAN KINERJA KOPERASI DENGAN *BALANCED SCORECARD***

*Rudy Lizwaril*

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KOTA DENPASAR**

*I Gusti Ayu Eka Damayanthi*



Jurusan Akuntansi Program S1  
Universitas Pendidikan Ganesha



# Jurnal Ilmiah

## Akuntansi dan Humanika

---

Vol. 4, No. 2, Juni 2015

ISSN: 2089-3310

PENGARUH KONSEP *FRAUD TRIANGLE* TERHADAP TINGKAT PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI MAKASSAR

*Tenriwaru*

FENOMENA FLYPAPER EFFECT PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

*Amiruddin dan Syarifuddin*

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELUM DITERAPKANNYA PENCATATAN KEUANGAN BERBASIS SAK ETAP DI UMKAM (STUDI KASUS UMKM DI KABUPATEN BULELENG)

*Ni Kadek Sinarwati*

DETEKSI KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF *FRAUD TRIANGLE*

*Tetty Apriani, Ni Wayan Rustiarini, dan Ni Made Sunarsih*

PENGARUH REPUTASI DAN ETIKA PIMPINAN PADA SENJANGAN ANGGARAN LEMBAGA PERKREDITAN RAKYAT DI KABUPATEN BULELENG

*I Nyoman Putra Yasa*

PRIORITAS PROGRAM KERJA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA) UNIT KERJA PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI

*Niswatin dan Nilawaty Yusuf*

EFEK MODERASI KOMITE AUDIT PADA HUBUNGAN RISIKO PERUSAHAAN DENGAN KONSERVATISME AKUNTANSI

*Luh Wayan Sumariani dan I Gede Cahyadi Putra*

PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* PADA MANAJEMEN LABA OLEH *CHIEF EXECUTIVE OFFICER* BARU

*Gerianta Wirawan Yasa dan Ni Putu Luvy Orty Andhani*

MERETAS PEMAHAMAN DAN KEBERTERIMAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI

*Rahayu Indriasari dan Muhammad Ansar*

PENGUKURAN KINERJA KOPERASI DENGAN *BALANCED SCORECARD*

*Rudy Lizwaril*

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DI KOTA DENPASAR

*I Gusti Ayu Eka Damayanthi*

## JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN HUMANIKA

### **Pelindung**

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

### **Penanggungjawab**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

### **Pemimpin Redaksi**

Anantawikrama Tungga Atmadja

### **Sekretaris Redaksi**

Nyoman Trisna Herawati

### **Penyunting Ahli**

Dr. Edy Sujana (Universitas Pendidikan Ganesha)  
Indra Bastian, MBA., Ph.D (Universitas Gadjah Mada)  
Prof. Dr. I Made Sudarma (Universitas Brawijaya)  
Dr. I Dewa Nyoman Badera (Universitas Udayana)  
Dr. Pujiono, M.Si (Universitas Negeri Surabaya)

### **Penyunting Pelaksana**

Ni Wayan Yulianita D  
Nyoman Ari Wahyuni  
Ni Kadek Sinarwati

### **Redaksi Pelaksana**

Nyoman Ari Surya Darmawan  
I Made Pradana Adi Putra  
Komang Adi Kurniawan

### **Penerbit**

Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiksha

Alamat Redaksi : Gedung Jurusan S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha),  
Jl. Udayana No 12 (Kampus Tengah) Singaraja Bali, Telp (0361)22570-23884, Fax 25735,  
Email: [jinah\\_undiksha@yahoo.co.id](mailto:jinah_undiksha@yahoo.co.id)  
Harga Langganan Rp. 50.000 + ongkos kirim (wilayah Bali Rp. 20.000 dan wilayah luar Bali  
Rp. 50.000) di transfer ke rekening BNI Cab. Singaraja No 0383575336

# **ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) DIKOTA DENPASAR**

**I Gusti Ayu Eka Damayanthi<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali. Indonesia  
Email: [ekadamayanthi1025@yahoo.com](mailto:ekadamayanthi1025@yahoo.com)/telp: +62 81 933069998  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud). Bali. Indonesia

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dikota Denpasar. Penelitian dilaksanakan Pada 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 11 Sekretariat Daerah di Kota Denpasar. Responden penelitian 44 Operator SIPKD. Teknik Analisis menggunakan analisis kuantitatif dengan 4 skala likert. Hasil Penelitian penerapan SIPKD dikota Denpasar termasuk kriteria Efektif.

***Kata Kunci*** : Efektifitas, SIPKD, SKPD

## **PENDAHULUAN**

Sistem teknologi informasi mempunyai peran dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan. Salah satu fungsi penerapan teknologi informasi adalah untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil yang berupa laporan keuangan. Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini adalah SIPKD merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), maka penggunaannya ditujukan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lebih jauh pada Surat Edaran No. SE.900/122/BAKD diamanatkan enam regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi.

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang berada di wilayah IV yang menggunakan SIPKD. Selain Pemerintah Provinsi Bali yang telah ditetapkan sebagai daerah basis implementasi SIPKD, di Bali dari 8 kabupaten dan 1 Kota Madya terdapat 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yang juga menerapkan SIPKD diantaranya Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar yang tidak lain adalah Pemerintah Kota Madya.

Pemerintah Kota Denpasar adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak pertengahan tahun 2010 dengan tahap penyesuaian yang sebelumnya sudah lebih dahulu menggunakan Sistem Informasi

Manajemen Daerah (SIMDA). Sistem terdahulu yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah sistem yang masih belum terintegrasi dengan Depdagri dan belum terkoneksi dengan kantor pusat, sehingga kantor pusat tidak dapat mengontrol atau mengambil data keuangan yang diperlukan secara *online*. Untuk keseragaman pengelolaan keuangan daerah maka SIMDA digantikan menjadi SIPKD. Setelah tahap penyesuaian penerapan SIPKD pada Pemerintah Kota Denpasar baru digunakan pada awal bulan Januari 2011 dan diterapkan oleh 34 SKPD di Pemerintah Kota Denpasar. Terhitung sudah dua tahun semenjak penggunaan aplikasi SIPKD, Pemerintah Kota Denpasar telah dapat menyajikan laporan keuangan dari hasil cetakan SIPKD yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 24 Tahun 2005).

Sistem pengelolaan keuangan daerah ini bertujuan untuk mendukung reformasi keuangan daerah menuju peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat peran dan fungsi keuangan daerah sebagai penggerak peningkatan kinerja ekonomi lokal dan peningkatan standar layanan. Efektivitas merupakan dasar yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan sudah mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar diharapkan akan berjalan efektif apabila sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada. Diharapkan dengan efektifnya penerapan

SIPKD maka kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Denpasar mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian efektivitas SIPKD di Pemerintah Kabupaten Tabanan sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Wower (2012) yang menggunakan indikator menurut Bodnar dan teknik analisis kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas SIPKD pada Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah berjalan dengan efektif. Hal ini juga menjadi salah satu pertimbangan peneliti untuk mengangkat judul serta membahas lebih lanjut tentang efektivitas SIPKD yang baru diterapkan selama dua tahun terakhir hingga tercetaknya Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan mendapatkan opini WTP di tahun 2012. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian menguji efektivitas SIPKD dengan menggunakan ukuran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana tingkat efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kota Denpasar.

Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Bodnar dan Hopwood (2000) menyatakan bahwa sistem informasi berbasis komputer merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan informasi secara cepat dan akurat.

SIPKD merupakan aplikasi atau sistem informasi berbasis teknologi komputer yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan

efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. SIPKD ini juga merupakan sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer. Menurut Nicolaou (2000) sistem informasi akuntansi ini didefinisikan sebagai sistem berbasis komputer yang memproses informasi keuangan dan mendukung keputusan tugas dalam konteks koordinasi dan mengendalikan kegiatan organisasi.

Pembangunan sistem ini secara garis besar bertujuan untuk mendukung reformasi keuangan daerah menuju peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah yang berkelanjutan serta memperkuat peran dan fungsi keuangan daerah sebagai penggerak peningkatan kinerja ekonomi lokal dan peningkatan standar layanan.

SIPKD terdiri dari beberapa kelompok sistem yaitu:

1. *Core Function System* yang merupakan sistem utama pengelolaan keuangan daerah meliputi: *planning* (perencanaan), *budget preparation* (persiapan anggaran), *budget execution* (pelaksanaan anggaran) dan *accounting* (akutansi).
2. *Non Core Function* merupakan sistem pendukung pengelolaan keuangan daerah yang meliputi, manajemen kas, manajemen pendapatan dan piutang, manajemen aset, dan manajemen hutang.



3. *Colaboration and Communication System* merupakan fasilitas pendukung pengelolaan keuangan daerah meliputi fasilitas kolaborasi dan komunikasi.

Sedangkan *output* dari SIPKD ini adalah berupa laporan-laporan, antara lain Laporan BKU (Buku Kas Umum), Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)/Fungsional, Kartu Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Jurnal Penerimaan, Jurnal Pengeluaran, Arus Kas, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu, Neraca, Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya. Adapun manfaat SIPKD adalah sebagai berikut:

- Bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, dengan menggunakan SIPKD akan terbantu dalam penguatan implementasi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah;
- Bagi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJPK) Kementerian Dalam Negeri, akan terbantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan terhadap pemerintah daerah, dalam bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;

- Bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, akan terbantu dalam pengumpulan data dan informasi keuangan daerah secara elektronik, utamanya yang terkait dengan kebijakan sinkronisasi keuangan negara dan keuangan daerah
- Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan terbentuknya database SIPKD yang standar dan terstruktur, akan memudahkan dan mempercepat proses audit keuangan daerah.

[www.sipkdjatengprov.blogspot.com](http://www.sipkdjatengprov.blogspot.com)

Laporan keuangan pokok pemerintah menurut PP 24 Tahun 2005 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Sedangkan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) membantu para pengguna untuk memahami isi laporan keuangan dan untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga diganti menjadi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). PP No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dan SAP Berbasis AkruaI mengamanatkan laporan keuangan menjadi tujuh laporan diantaranya LRA, LAK, Neraca, CALK, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum

siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akruwal. Penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal ini dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu paling lambat tahun 2015. Selanjutnya, setiap entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan SAP Berbasis Akruwal. Walaupun entitas pelaporan untuk sementara masih diperkenankan menerapkan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal, entitas pelaporan diharapkan dapat segera menerapkan SAP Berbasis Akruwal.

PP No. 32 Tahun 2012 menyebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. SKPD berorientasi untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam konteks birokrasi dan penyediaan sarana dan prasarana umum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. SKPD mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sehingga pada setiap SKPD secara kelembagaan terdapat sub bagian pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan persoalan keuangan menjadi persoalan mendasar yang wajib dikelola secara tertib oleh SKPD dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi kewenangannya (Kusumawati, 2010).

Aparat SKPD yang diberikan kewajiban mengelola keuangan daerah pada umumnya adalah bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara dan/atau pembuat dokumen beserta atasannya yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar menggunakan bantuan aplikasi SIPKD. Ukuran kinerja tingkat kabupaten/kota digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja pemda dalam mengimplementasikan strategi dalam mencapai visi misi daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis daerah (Dewi, 2009).

Laporan Keuangan SKPD merupakan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa pelaksanaan dan

penyusunan laporan keuangan berada pada tingkat SKPD. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kepala SKPD selaku pengguna anggaran diharuskan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pencatatan atas transaksi tersebut sebagai bahan dalam menyiapkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang harus disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

SKPD pada nantinya akan mempertanggungjawabkan laporan keuangan di tiap-tiap SKPD kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dan nantinya akan diolah menjadi Laporan Keuangan pemerintah daerah. Pada laporan tersebut, BPK akan mengaudit laporan dan memberikan opini terkait akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor akan mengaudit Laporan Keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini audit sebagai cerminan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan untuk mempertahankan suatu opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah setiap SKPD dihimbau untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penelitian Fikri (2011) tentang Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada instansi Pemerintah Kota Padang menyatakan bahwa SIKD dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) efektif di Kota Denpasar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar dengan jumlah SKPD sebanyak 34 unit SKPD dan 11 unit Sekretariat Daerah pada Pemerintahan Kota Denpasar.

### **Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah Laporan Keuangan SKPD yang telah menerapkan SIPKD di lingkungan Kota Denpasar. Hal ini dikarenakan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah Laporan Keuangan SKPD. PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa pelaksanaan dan penyusunan laporan keuangan berada pada tingkat SKPD.

### **Populasi, Sampel dan Responden**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh operator SIPKD pada bagian keuangan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Pada lingkungan Pemerintah Kota Denpasar terdapat 34 SKPD dengan 11 unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar. Responden penelitian seluruh operator SIPKD menurut SK Walikota adalah sebanyak 44 operator SIPKD. Hal ini dikarenakan SIPKD digunakan secara langsung oleh operator dalam meng-*entry* dan kaitannya dalam penyajian laporan dalam pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

### **Teknik Penentuan Sampel**

Teknik pemilihan dan penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode penentuan dengan sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:78). Adapun Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 44 orang operator SIPKD.

## **Metode Pengumpulan data**

Metode pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner langsung diantarkan ke lokasi penelitian dan diberikan kepada responden dan kemudian melakukan wawancara. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Likert yaitu pilihan jawaban responden diberi nilai skala yang telah ditentukan sesuai dengan pernyataan yang ada.

## **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis data dengan melakukan prosedur perhitungan tertentu sehubungan dengan penilaian terhadap efektivitas penerapan kebijakan akuntansi. Menurut Sugiyono (2012:132) skala *Likert* yaitu skala untuk mengukur sikap, perilaku, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Persentase efektivitas penerapan kebijakan akuntansi sebagai berikut:

- Jawaban sangat positif mempunyai skor 4 (empat)
- Jawaban positif mempunyai skor 3 (tiga)
- Jawaban negatif mempunyai skor 2 (dua)
- Jawaban sangat negatif mempunyai skor 1 (satu)

Prosedur perhitungan persentase efektivitas penerapan kebijakan akuntansi berdasarkan jawaban dari responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah yang mungkin dicapai dari kuesioner yang diajukan.
2. Menentukan besarnya range skor nilai berdasarkan seluruh total skor nilai tertinggi yang mungkin dicapai dengan total skor nilai terendah yang mungkin dicapai.

3. Menentukan besarnya interval nilai berdasarkan perbandingan antara *range* skor nilai dengan jumlah kriteria nilai yang diperlukan. Terdapat empat kriteria, yaitu:

- (i) Kriteria Sangat Efektif (KSE)
- (ii) Kriteria Efektif (KE)
- (iii) Kriteria Kurang Efektif (KKE)
- (iv) Kriteria Tidak Efektif (KTE)

Rumus sebagai berikut:

$$\text{Interval nilai } c = \frac{(a-b)}{k} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- c = interval nilai
- a = skor tertinggi
- b = skor terendah
- k = konstanta = 4

4. Menentukan rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian berdasarkan total skor nilai yang diperoleh masing-masing unsur dengan formulasinya sebagai berikut:

- (i)  $b + 3c < \text{KSE} < a$  .....(3)
- (ii)  $b + 2c < \text{KE} < b + 3c$  .....(4)
- (iii)  $b + c < \text{KKE} < b + 2c$  .....(5)
- (iv)  $b < \text{KTE} < b + c$  .....(6)

5. Menentukan presentase terhadap keseluruhan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dan menentukan penilaian efektivitas penerapan SIPKD sebagai pengolahan

data dengan fo

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total skor responden}}{\text{Total skor tertinggi yang mungkin dicapai}} \times 100 \dots\dots(7)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi Penelitian adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kota Denpasar yang berjumlah 34 SKPD dan 11 Unit Kerja pada Sekretariat Daerah dikota Denpasar. Sampel penelitian adalah seluruh populasi dengan menggunakan metode sampel Jenuh. Responden penelitian sebanyak 44 orang operator yang menggunakan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Responden penelitian dikelompokkan menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, dan lama bekerja.

Berdasarkan tabel 1 diatas maka dapat dijelaskan bahwa jumlah responden yang menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terdiri dari pria sebanyak 18 orang atau 41% dan wanita sebanyak 26 orang atau 59%. Berdasarkan umur responden pengguna SIPKD rata-rata umur 31-45 Tahun sebanyak 25 orang atau 57%. Tingkat pendidikan rata-rata S1 sebanyak 25 orang atau 57%. Lama berkerja kurang dari 5 tahun 18 orang atau 41 persen. Antara 5-10 Tahun sebanyak 15 orang atau 34%. Lebih dari 10 tahun sebanyak 11 orang atau 25%.

**Tabel 1**  
**Profil Responden**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Pria	18	41%
	Wanita	26	59%
2	Umur		
	Kurang dari 30 tahun	13	30%
	Antara 31- 45 tahun	25	57%
	Diatas 45 Tahun	6	14%
3	Pendidikan		
	SMA/Sederajat	14	32%
	Diploma	5	12%
	S1	25	57%
4	Lama Berkerja		
	Kurang dari 5 Tahun	18	41%
	Antara 5 – 10 Tahun	15	34%
	Lebih dari 10 Tahun	11	25%

Sumber Data: Data diolah (2014)

### **Analisis Kuantitatif**

Tingkat efektivitas penerapan SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar secara total dapat dilihat dengan menggabungkan indikator yang digunakan melakukan penilaian. Untuk mengetahui kelima indikator tersebut, yaitu.



- 1) Efektivitas penerapan SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai dari indikator keamanan data. Berdasarkan teknik perhitungan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 2 responden (4,55%) menyatakan tingkat efektivitas SIKPD termasuk dalam Kriteria Kurang Efektif (KKE), 33 responden (75%) termasuk dalam Kriteria Efektif (KE), dan sisanya 9 responden (20,45%) termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di Pemerintah Kota Denpasar dinilai telah efektif dan mampu memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna dilihat dari sudut indikator keamanan data.
- 2) Efektivitas penerapan SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai dari indikator kecepatan dan ketepatan waktu. Berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7 responden (15,91%) menyatakan tingkat efektivitas SIKPD termasuk dalam Kriteria Tidak Efektif (KTE), 28 responden (63,63%) termasuk dalam Kriteria Kurang Efektif (KKE), 7 responden (15,91%) termasuk dalam Kriteria Efektif (KE), dan sisanya 2 responden (4,55%) termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di kota Denpasar dinilai kurang efektif dan kurang mampu memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna dilihat dari sudut indikator kecepatan dan ketepatan waktu.
- 3) Efektivitas penerapan SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai dari indikator ketelitian. Perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30 responden (68,18%) menyatakan tingkat efektivitas SIKPD termasuk dalam Kriteria Efektif (KE), dan sisanya 14 responden (31,82%) termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai telah efektif dan mampu memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna dilihat dari sudut indikator ketelitian.

- 4) Efektivitas penerapan SIPKD di kota Denpasar dinilai dari indikator indikator variasi laporan. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10 responden (22,73%) menyatakan tingkat efektivitas SIKPD termasuk dalam Kriteria Kurang Efektif (KKE), 31 responden (70,45%) termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) dan sisanya 3 responden (6,82%) termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai telah efektif dan mampu memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna dilihat dari sudut indikator variasi laporan.
- 5) Efektivitas penerapan SIPKD di pemerintah kota Denpasar dinilai dari indikator relevansi sistem. Dari perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3 responden (6,82%) menyatakan tingkat efektivitas SIKPD termasuk dalam Kriteria Kurang Efektif (KKE), 38 responden (86,36%) termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) dan sisanya 3 responden (6,82%) termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif (KSE). Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di kota Denpasar dinilai telah efektif dan mampu memenuhi harapan yang diinginkan oleh pengguna dilihat dari sudut indikator variasi relevansi sistem. Berdasarkan perhitungan sebelumnya maka dapat dirangkum sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD) di Kota Denpasar**

<b>Berdasarkan Indikator</b>	<b>Kriteria Efektivitas</b>	<b>%</b>
Variabel Keamanan Data	Termasuk Kriteria Efektif (KE)	75
Variabel Kecepatan dan Ketepatan Waktu	Termasuk Kriteria Kurang Efektif (KKE)	64
Variabel Ketelitian	Termasuk Kriteria Efektif (KE)	68
Variabel Variasi Laporan	Termasuk Kriteria Efektif (KE)	71
Variabel Relevansi Sistem	Termasuk Kriteria Efektif (KE)	86

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan penilaian masing-masing indikator dapat disimpulkan dari kelima indikator efektivitas penerapan SIPKD, empat indikator berada pada Kriteria Efektif (KE) antara lain Keamanan data (75% responden), Ketelitian (68% responden), Variasi laporan (71% responden) dan Relevansi Sistem (86% responden). Sedangkan untuk indikator kecepatan dan ketepatan waktu berada pada Kriteria Kurang Efektif (KKE) dengan perolehan 64% responden.

Untuk mengetahui hasil jawaban responden terhadap penilaian tingkat efektivitas SIPKD di pemerintah kota Denpasar yang dinilai secara total dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Jawaban Responden atas Penilaian Tingkat Efektivitas Penerapan SIPKD di Kota Denpasar Secara Total**

Responden	Skor Nilai Total Setiap Indikator					Total Skor
	1	2	3	4	5	
44 Operator SIPKD	668	474	417	501	523	2583

Sumber: Data diolah

Keterangan:

- 1 = indikator keamanan data
- 2 = indikator waktu
- 3 = indikator ketelitian
- 4 = indikator variasi laporan
- 5 = indikator relevansi sistem

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui termasuk dalam kategori manakah tingkat efektivitas SIPKD di kota Denpasar jika dinilai secara total, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$(c) = \frac{a-b}{4} \quad ; \quad (c) = \frac{3696-924}{4} = 693$$

Keterangan:

- (c) = Interval nilai
- a = Skor tertinggi yang mungkin dicapai, yaitu 4 x jumlah pernyataan x jumlah responden
- b = Skor terendah yang mungkin dicapai, yaitu 1 x jumlah pernyataan x jumlah responden

Berdasarkan perhitungan yang telah dipaparkan maka rentang nilai untuk masing-masing kriteria penilaian dapat ditentukan dengan formulasi sebagai berikut.

$$(i) \text{Kriteria Sangat Efektif (KSE)} = 3003 \leq \text{KSE} \leq 3696$$

$$(ii) \text{Kriteria Efektif (KE)} = 2310 \leq \text{KE} \leq 3003$$

$$(iii) \text{Kriteria Kurang Efektif (KKE)} = 1617 \leq \text{KKE} \leq 2310$$

$$(iv) \text{Kriteria Tidak Efektif (KTE)} = 924 \leq \text{KTE} \leq 1617$$

Dari Tabel 3 maka dapat ditentukan persentase dari masing-masing kriteria sebagai berikut.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Totalskor responden}}{\text{Totalskor tertinggi yang mungkin dicapai}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2583}{3696} \times 100\% = 69,90\%$$

Dari Tabel 3 maka total skor sebesar 2583 yang apabila dibandingkan dengan rentang nilai masing-masing kriteria, skor nilai tersebut termasuk dalam Kriteria Efektif (KE) dengan besarnya efektivitas penerapan SIPKD secara keseluruhan sebesar 69,90%. Sehingga, tingkat efektivitas SIPKD di kota Denpasar termasuk dalam Kriteria Efektif (KE).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas penerapan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintahan Kota Denpasar adalah Kriteria Efektif (KE).

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alter, Steven. 1992. *The Infomation Systems: A Management Perspective. The Benjamin/Cummings Publishing Company Inc.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. 2009. *Denpasar Dalam Angka, Bappeda Kota Denpasar.*

Bodnar, H. George dan William S. Hopwood (Amir Abadi Jusuf dan Rudi M. Tambunan, penerjemah). 2000. *Sistem Informasi Akuntansi*. Buku I Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Handoko, Riwidikdo. 2009. *Statistik untuk Penelitian Kesehatan dengan Aplikasi Program R dan SPSS*. Yogyakarta : Pustaka Rihama.

Nicolaou, Andreas I. 2000. A Contingency Model of Perceived Effectiveness in Accounting Information Systems : Organizational Coordination And Control Effect. *International Journal of Accounting Information Systems*, 1(2000): h: 91-105.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor SE.900/1199/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

-----[www.djkd.kemendagri.go.id](http://www.djkd.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 2 bulan Agustus tahun 2013.

-----[www.sipkdjatengprov.blogspot.com](http://www.sipkdjatengprov.blogspot.com). Diakses tanggal 10 bulan Agustus tahun 2013.

## LAMPIRAN 1: Daftar SKPD di Pemerintah Kota Denpasar

No.	SKPD
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Wangaya
4	Dinas Pekerjaan Umum
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Dinas Tata Ruang
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Dinas Perhubungan
9	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10	Badan Lingkungan Hidup
11	Dinas Catatan Sipil
12	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
14	Dinas Koperasi
15	Dinas Kebudayaan
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
17	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
18	Sekretariat Daerah
	- Bagian Umum
	- Bagian Keuangan
	- Bagian Humas
	- Bagian Ekonomi
	- Bagian Pemerintahan
	- Bagian Hukum
	- Bagian Program Pembangunan
	- Bagian Organisasi
	- Bagian Kesejahteraan Masyarakat
	- Bagian Kerjasama
	- Bagian Aset
19	Sekretariat DPRD
20	Dinas Pendapatan
21	Inspektorat
22	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
23	Kecamatan Denpasar Barat
24	Kecamatan Denpasar Selatan
25	Kecamatan Denpasar Timur
26	Kecamatan Denpasar Utara
27	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Permodalan
28	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
29	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah
30	Dinas Komunikasi dan Informasi
31	Dinas Pertanian dan Perkebunan
32	Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan
33	Dinas Pariwisata
34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber: Bagian Keuangan Setda Kota Denpasar, 2013